

Implementasi *Sustainable Development Goals* Terhadap Penggunaan Dana Desa di Desa Mangki Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang

Ryan Nugraha Haris^{✉1}, Citra Ayni Kamaruddin², Muhammad Syafri³

^{1,2,3} Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi SDGs pada pengelolaan dana desa dan kendala yang dihadapi dalam pengimplementasian SDGs terhadap penggunaan dana desa di Desa Mangki Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pengimplementasian SDG's pada pengelolaan dana desa di Desa Mangki diwujudkan melalui Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional yang terdiri atas empat tahapan yaitu (a) Perencanaan, dilakukan melalui musyawarah dan penyusunan program desa; (b) Pengendalian, dilakukan melalui pendataan dan sosialisasi kepada masyarakat; (c) pelaksanaan, dilakukan melalui program SDG's di Desa Mangki yang terdiri atas 11 program yaitu desa bebas dari kemiskinan, desa bebas dari kelaparan, desa yang sejahtera dan sehat, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi yang baik, menciptakan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi, inovasi dan infrastruktur desa, lingkungan yang tenang dan tentram, kemitraan untuk pembangunan desa serta kelembagaan dan budaya; (d) evaluasi, dilakukan melalui penilaian program yang ada, implementasi program SDGs dalam pengelolaan dana desa di Desa Mangki dinyatakan telah tercapai dengan baik, dimana dilakukan secara transparan dan melibatkan masyarakat desa sendiri; dan (2) Kendala yang dihadapi dalam implementasi SDGs pada pengelolaan dana desa yaitu dalam proses pendataan terkait kondisi lingkungan dan data penduduk yang belum 100% dilakukan serta kendala pada pemahaman masyarakat terhadap konsep SDGs.

Kata Kunci: *Dana Desa, Implementasi, Sustainable Development Goals.*

Abstract

This study aims to determine the implementation of SDGs in the management of village funds and the obstacles faced in implementing SDGs on the use of village funds in Mangki Village, Cempa District, Pinrang Regency. This study uses a quantitative descriptive approach. The results of the study indicate that (1) The implementation of SDGs in the management of village funds in Mangki Village is realized through Law No. 25 of 2004 concerning National Development Planning which consists of four stages, namely (a) Planning, carried out through deliberation and preparation of village programs; (b) Control, carried out through data collection and socialization to the community; (c) implementation, carried out through the SDG's program in Mangki Village which consists of 11 programs, namely poverty-free villages, hunger-free villages, prosperous and healthy villages, quality education, gender equality, clean water and good sanitation, creating jobs and economic growth, innovation and village infrastructure, a calm and peaceful environment, partnerships for village development and institutions and culture; (d) evaluation, carried out

through an assessment of existing programs, the implementation of the SDGs program in the management of village funds in Mangki Village was stated to have been achieved well, which was carried out transparently and involved the village community itself; and (2) Obstacles faced in the implementation of SDGs in the management of village funds, namely in the data collection process related to environmental conditions and population data which has not been 100% carried out as well as obstacles in the community's understanding of the SDGs concept.

Keywords: *Village Funds, Implementation, Sustainable Development Goals.*

Copyright (c) 2025 Ryan Nugraha Haris

✉ Corresponding author : Ryan Nugraha Haris
Email Address : ryannugraharis1@gmail.com

PENDAHULUAN

SDGs merupakan pembangunan yang bersifat universal dan inklusif (Amirya & Arianto, 2023). Universal karena negara-negara maju menerapkannya ke semua negara di seluruh dunia, tidak hanya negara-negara dengan perekonomian kurang berkembang. Konsep dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau dikenal dengan pembangunan berkelanjutan yaitu sebagai upaya manusia dalam melakukan perbaikan mutu kehidupan. Terdapat 17 tujuan pembangunan berkelanjutan dengan 169 target yang terukur dengan target waktu telah ditentukan yaitu 15 tahun hingga tahun 2030. Pada poin pertama 17 tujuan dari SDGs adalah tanpa kemiskinan (*no poverty*).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa) menjelaskan bahwa dana desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa.

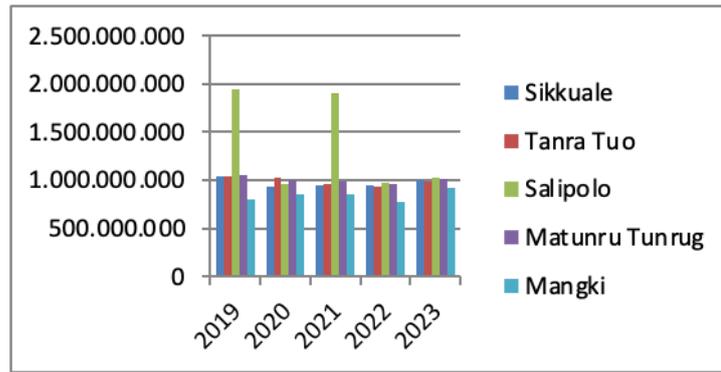
Dana desa yang diberikan kepada tiap daerah seperti pada Kabupaten Pinrang yang kemudian dialokasikan masing-masing tiap kelurahan, kecamatan, lalu tiap desa. Dana desa ini pun diprioritaskan untuk pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. Berikut ini dapat dilihat alokasi dana desa tiap kecamatan di Kabupaten Pinrang tahun 2019-2023 yang disajikan pada table berikut:

Tabel 1. 1 Alokasi Dana Desa Per Kecamatan Tahun 2019-2023

Kecamatan	Alokasi Dana Desa				
	2019	2020	2021	2022	2023
MT. Sompe	5.855.297.000	7.342.496.000	6.850.775.000	6.652.280.000	7.010.004.000
Suppa	8.153.471.000	8.855.477.000	8.162.449.000	7.925.948.000	8.407.199.000
MT. Bulu	5.849.830.000	7.355.040.000	6.874.142.000	6.654.967.000	6.129.483.900
Patampanua	5.963.328.000	7.371.819.000	6.894.225.000	505.627.632	7.059.157.000
Duampanua	8.792.337.000	10.611.622.000	9.885.670.000	758.034.369	10.133.291.000
Lembang	18.919.255.000	16.568.661.000	15.308.605.000	9.560.320.600	14.973.341.000
Cempa	5.108.177.000	6.326.953.000	4.928.266.000	5.735.405.000	6.046.963.000
Lanrisang	4.942.237.000	4.187.226.000	5.855.897.000	5.686.235.000	4.011.687.000
Batu Lappa	3.943.239.000	4.345.359.000	3.057.098.000	3.918.934.000	4.164.672.000

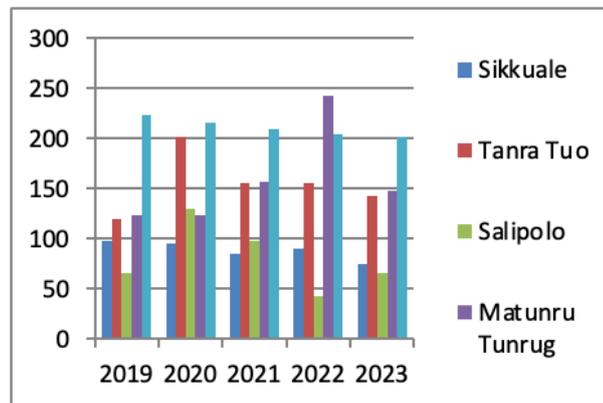
Sumber : Desa Mangki, Kec. Cempa, Kab. Pinrang, 2024

Kecamatan Cempa merupakan satu-satunya kecamatan yang ada di Kabupaten Pinrang yang memiliki desa terbanyak. Kecamatan Cempa memiliki variasi kondisi sosial-ekonomi yang mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan dana desa. Penelitian ini akan meneliti Kecamatan Cempa sebagai objek penelitian. Selanjutnya dapat dilihat Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Cempa setiap Desa tahun 2019-2023.



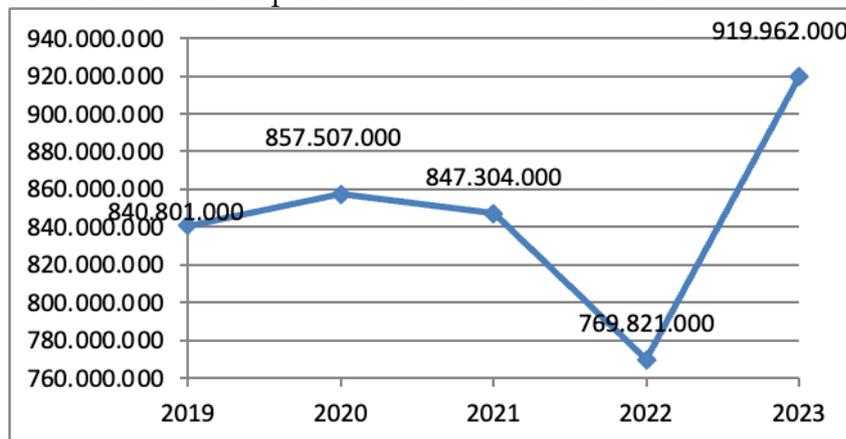
Gambar 1. 1 Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Cempa Tiap Desa Tahun 2019-2023

Desa Mangki merupakan desa yang memiliki anggaran dana desa terendah dibandingkan dengan desa lainnya di kecamatan Cempa. Hal ini tentu menjadi permasalahan dikarenakan desa Mangki memiliki jumlah masyarakat miskin yang banyak. Berikut jumlah masyarakat miskin di Kecamatan Cempa.



Gambar 1. 2 Jumlah Masyarakat Miskin di Kecamatan Cempa Tiap Desa Tahun 2019-2023

Desa Mangki memiliki jumlah masyarakat miskin pada tahun 2019, 2020, 2021 dan 2023. Hal ini berbeda dengan jumlah anggaran dana desa Mangki yang seharusnya perlu ditingkatkan demi mensejahterakan masyarakat miskin di Desa Mangki. Berikut dapat dilihat dana desa Kecamatan Cempa dalam lima tahun terakhir.



Gambar 1. 3 Dana Desa Kecamatan Cempa Tahun 2019-2023

Permasalahan yang ditemui yaitu implementasi SDGS terhadap penggunaan dana desa untuk pembangunan di desa, terutama pasca pandemi Covid-19 yang merupakan era

dimana setiap daerah berusaha untuk membangun kembali perekonomian. Ketika Pandemi Covid-19, setiap daerah mengalami penurunan pendapatannya termasuk di desa Mangki Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang. Desa Mangki menjadi desa dengan dnggaran dana desa terendah dibandingkan Desa lainnya di Kecamatan Cempa, namun memiliki jumlah masyarakat miskin terbanyak pada tahun 2019, 2020, 2021, dan 2023. Berdasarkan permasalahan ini, peneliti ingin melihat bagaimana pengimplementasian SDGs terhadap penggunaan dana desa untuk membangun perencanaan pembangunan di Desa Mangki Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang.

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dimana penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang didasarkan pada filosofi postpositivis dan digunakan untuk mempelajari kondisi objek alam dibandingkan dengan eksperimen. Teknik pengumpulan data bersifat triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan temuan penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Adapun data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk pengujian keabsahan data peneliti menggunakan uji kredibilitas (triangulasi sumber, triangulasi metode dan triangulasi teori) dan uji keteralihan. Peneliti menggunakan analisis berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat dan kepala Desa Mangki, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PENGELOLAAN DANA DESA

Pada dasarnya pengelolaan dana desa mulai dilaksanakan di Indonesia pada tahun 2005 dengan dasar Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang desa, kini dipertegas dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Berdasarkan data dari kantor Desa Mangki tahun kemarin yaitu pada tahun 2023, jumlah dana desa yang diterima Desa Mangki yaitu sebesar Rp 1.047.967.000,-. Sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Mangki yaitu sebesar Rp 1.003.052.000,-. Dana desa digunakan pada beberapa program pengimplementasian SDGs di Desa Mangki seperti pada program-program yang berhasil tercapai dan terbentuk. Masyarakat Desa Mangki mengatakan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Mangki telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dilakukan secara transparan serta melibatkan masyarakat Desa Mangki. Hal ini seperti pernyataan berikut ini.

"Pengelolaan dana desa di Pemerintah Desa Mangki sudah sesuai peraturan yang berlaku, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Semua tahap dilakukan secara transparan dan melibatkan berbagai elemen masyarakat, seperti tokoh masyarakat, pemuda, agama, dan wanita" (H, 39 Tahun).

Beberapa program SDG's yang diimplementasikan dalam pengelolaan dana desa di Desa Mangki yaitu seperti pembangunan infrastruktur, penyaluran BLT dan program penyelenggaraan posyandu untuk menurunkan angka stunting. Program ini merupakan program yang dirasakan masyarakat sangat membantu kehidupan mereka.

IMPLEMENTASI SDGS PADA PENGELOLAAN DANA DESA

Pengimplementasian dana desa dalam mewujudkan SDGs di Desa Mangki tidak semua tercapai dan terbentuk. Hanya beberapa program dan kegiatan SDGs yang dapat terealisasikan. Berdasarkan hasil penelitian, berikut ini tabel program SDGs yang ada di Desa Mangki.

Tabel 4. 1 Program SDGs Desa Mangki

No	Program SDGs Desa	Jenis Kegiatan	Jenis Anggaran
1.	Desa bebas dari kemiskinan	BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan Bantuan dari Dinas Sosial.	Dana desa
2.	Desa bebas dari kelaparan	Bantuan berupa uang dan sembako	Dana desa
3.	Desa yang sejahtera dan sehat	Penyediaan fasilitas kesehatan, penyelenggaraan posyandu (Makanan tambahan, KIS ibu hamil, lansia, insentif)	Dana desa
4.	Pendidikan berkualitas	Penyediaan fasilitas pendidikan, pengadaan penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat desa	Dana desa
5.	Kesetaraan gender	-	-
6.	Air bersih dan sanitasi yang baik	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan sistem pembuangan air limbah	Dana Desa
7.	Menciptakan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi	Penyediaan modal bagi masyarakat dari BUMDes	Dana Desa
8.	Inovasi dan infrastruktur desa	-Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum. - Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan saluran irigasi tersier /sederhana, pengerasan. -Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan jalan usaha tani. - Pembangunan / Rehabilitasi/ Peningkatan prasarana jalan desa.	Dana desa
9.	Lingkungan yang tenang dan tenteram	-	-
10.	Kemitraan untuk pembangunan desa	BUMDesa	Dana desa
11.	Kelembagaan dan budaya	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD dan pembinaan PKK	Dana Desa

Sumber : Data Diolah, 2024

1. Perencanaan

Perencanaan yang dilakukan di Desa Mangki yaitu melalui musyawarah bersama. Masyarakat akan diundang untuk datang mengikuti musyawarah bersama, dan masing-masing dusun harus menghadirkan perwakilannya. Musyawarah dilakukan dengan mengumpulkan seluruh pendapat masyarakat dan menyaring pendapat tersebut untuk disetujui. Selain itu, dalam musyawarah juga dilakukan pembahasan mengenai kemungkinan-kemungkinan buruk yang bisa saja terjadi saat pengimplementasian program SDG's. Perencanaan yang dibuat dalam musyawarah memuat terkait keputusan dan kebijakan untuk mencapai tujuan bersama dimasa depan. Hal ini sesuai dengan pendapat Nasution (2022) bahwa perencanaan merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu untuk masa yang akan datang. Selanjutnya perencanaan diupayakan menyusun program yang tepat sasaran demi untuk kepentingan bersama. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Friedman (1987) yaitu perencanaan harus bertujuan untuk kepentingan masyarakat banyak.

Musyawarah dilakukan dengan tujuan agar penggunaan dana desa bisa lebih transparan. Hal ini sesuai dengan pendapat Arifin Muksin dkk (2023) bahwa pada prinsipnya alokasi dana desa yang diberikan menganut prinsip transparansi, akuntabel dan partisipasi. Selanjutnya, perencanaan program SDG's yang dilakukan dengan

Implementasi Sustainable Development Goals Terhadap Penggunaan....

mengupayakan agar perekonomian masyarakat dapat meningkat dan berkembang. Hal ini dapat dilihat dari pendapatan masyarakat yang meningkat atau tidak, serta apakah terdapat lapangan kerja yang terbuka lebih banyak untuk masyarakat.

“Program SDG’s yang disusun yaitu program yang memperhatikan dan mengusung upaya dalam mencapai perekonomian yang baik, seperti pendapatan masyarakat desa dapat lebih ditingkatkan dan masyarakat bisa memiliki kesempatan kerja atau dalam arti lapangan pekerjaan bisa lebih banyak untuk masyarakat desa”. (F, 36 Tahun).

Hal ini sesuai dengan ciri khusus dari perencanaan pembangunan yang dikemukakan oleh Suriyati Hasan (2018) yaitu (1) Perencanaan yang isinya upaya-upaya untuk mencapai perkembangan ekonomi yang kuat dapat tercermin dengan terjadinya pertumbuhan ekonomi positif; (2) Ada upaya untuk meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat; (3) Mempunyai tujuan meningkatkan kesempatan kerja/lapangan pekerjaan.

2. Pelaksanaan

1) Desa Bebas dari Kemiskinan

Program SDG’s yaitu desa bebas dari kemiskinan di Desa Mangki dilakukan dengan memberikan bantuan kepada masyarakat desa yang membutuhkan yaitu melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan bantuan dari Dinas Sosial.

“Ada beberapa bantuan untuk mereka untuk pemenuhan sehari-hari dari pemerintah, ada juga dari keluarga mereka, dan tetangga-tetangga. Bantuan dari pemerintah berupa bantuan sosial” (A, 29 Tahun).

Bantuan Langsung Tunai (BLT) bersumber dari APBDDesa dan bersumber dari dana desa. Dasar pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, serta melalui instruksi Menteri Desa PDT Nomor 1 Tahun 2020 tentang Percepatan Penyaluran BLT Dana Desa (Agustina & Hendra, 2021).

2) Desa Bebas dari Kelaparan

Program Desa Bebas Kelaparan yaitu dengan melihat ketahanan pangan desa tersebut. Mengacu pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, ketahanan pangan didefinisikan sebagai kondisi dimana kebutuhan pangan negara sampai dengan perseorangan dapat terpenuhi. Hal tersebut ditandai dengan tersedianya pangan yang cukup, baik secara jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

Sebagian besar masyarakat Desa Mangki bekerja sebagai petani. Berdasarkan hal tersebut maka ketahanan pangan masyarakat Desa Mangki sudah terpenuhi sehingga mereka bebas dari kelaparan. Adapun untuk masyarakat kurang mampu, pemerintah memberikan bantuan sosial baik berupa uang maupun sembako melalui dana desa yang ada.

“Sebagian besar masyarakat Desa Mangki bekerja sebagai petani. Jadi kehidupan rata-rata masyarakat disini sangat erat dengan bertani. Ada yang menanam padi, buah maupun sayuran. Sehingga untuk pangan masyarakat Desa Mangki sudah sangat tercukupi”. (K, 51 Tahun).

Dalam mengentaskan kelaparan pada masyarakat Desa Mangki, petani yang berproduksi pada sawah dan kebun mereka diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas dari pangan. Hal ini sejalan dengan salah satu target dalam tujuan *zero hunger*, yaitu “pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen kecil, khususnya perempuan, masyarakat adat, keluarga petani, penggembala dan nelayan (Paruza & Firdaus, 2023).

3) Desa yang Sejahtera dan Sehat

Implementasi SDG’s dalam pengelolaan dana desa Mangki diwujudkan melalui kegiatan penyediaan fasilitas kesehatan dan penyelenggaraan posyandu. Fasilitas kesehatan

yaitu seperti adanya posyandu dan posdaya. Penyelenggaraan posyandu seperti pemberian makanan tambahan, KIS bumil, lansia dan juga adanya insentif. Posyandu sendiri berperan sangat penting bagi ibu hamil dan anak (bayi dan balita), ibu dapat memantau perkembangan kehamilan maupun pertumbuhan dan perkembangan anak mereka agar terhindar dari stunting. Hal ini sejalan dengan pernyataan Kementerian RI Tahun 2012 bahwa “posyandu mempunyai peran penting sebagai salah satu kegiatan sosial bagi ibu-ibu untuk memantau tumbuh kembang anak. Pemanfaatan posyandu dalam mengatasi permasalahan stunting sesuai dengan visi kementerian Kesehatan yaitu menciptakan masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan dengan misi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani”.

4) Pendidikan Berkualitas

Pendidikan di Desa Mangki telah memenuhi standar, sehingga dapat dikatakan berkualitas. Implementasi SDG's dalam pengelolaan dana desa Mangki pada program pendidikan berkualitas diwujudkan melalui penyelenggaraan fasilitas pendidikan serta adanya penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat. Fasilitas pendidikan di Desa Mangki telah memenuhi standar dan mendukung proses pembelajaran. Hal ini sesuai dengan salah satu upaya dalam meningkatkan mutu/kualitas pendidikan menurut Kriswana (2019) dalam Riyad et al., (2022), yaitu sarana dan prasarana mendukung proses belajar mengajar.

5) Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender di Desa Mangki sudah sangat diperhatikan. Hal ini dapat dilihat bahwa perempuan dan laki-laki memiliki peran yang sama baik dalam pemerintahan maupun dalam masyarakat umum.

“Di Desa Mangki, kesetaraan hak dan kewajiban perempuan di dalam pemerintahan sudah diperhatikan seperti perempuan ikut dilibatkan dalam kegiatan desa serta perempuan juga berperan dalam pengambilan keputusan di tingkat Desa” (S, 48 Tahun).

Hal ini sejalan dengan pernyataan (Bangun, 2020) bahwa “Prinsip kesetaraan gender ditandai dengan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan”.

6) Air Bersih dan Sanitasi yang Baik

Air bersih di Desa Mangki sudah tercukupi dengan baik dan merata. Implementasi SDG's dalam pengelolaan dana desa Mangki diwujudkan melalui pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pada sistem pembuangan air limbah sehingga menunjang air bersih dan sanitasi yang baik di Desa Mangki.

“Untuk sanitasi, rata-rata di desa sudah ada pembangunan drainase, dan ada pula pembuangan limbah untuk masyarakat desa Mangki. Sehingga lingkungan di Desa Mangki sendiri sangat terjaga kebersihannya” (R, 31 Tahun).

Dengan tersedianya air bersih serta sanitasi yang baik, maka masyarakat akan merasa nyaman dengan terpenuhinya air bersih untuk menunjang kebutuhan mereka sehari-hari. Hal ini sejalan dengan pendapat Hargono et al., (2022) bahwa tingkat kenyamanan suatu rumah tangga dalam bertempat tinggal salah satunya ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana diantaranya tersedianya sarana dan prasarana sanitasi air.

7) Menciptakan Lapangan Pekerjaan dan Pertumbuhan Ekonomi

Implementasi SDG's dalam pengelolaan dana desa Mangki diwujudkan melalui penciptaan lapangan pekerjaan melalui adanya BUMDes. Masyarakat Desa Mangki merasakan peran penting BUMDes dalam perekonomian mereka.

“Dengan adanya BUMDes yang didanai oleh dana desa, banyak ibu-ibu di Desa Mangki yang diberdayakan dan memperoleh tambahan penghasilan. Selain itu, pemuda-pemudi yang sebelumnya menganggur kini direkrut dan diberi pekerjaan di

BUMDes, sehingga semuanya memiliki penghasilan. Kami merasa lebih sejahtera berkat adanya dana desa ini" (N, 58 Tahun).

Hal ini sejalan dengan pernyataan Chikmawati (2019) bahwa BUMDes merupakan elemen dan instrument penggerak ekonomi masyarakat desa. BUMDes harus dipahami dan dilakukan secara maksimal. BUMDes menjadi pusat perekonomian masyarakat desa untuk menumbuhkembangkan ekonomi lokal. Keberadaan BUMDes adalah untuk memperkuat ekonomi rakyat desa.

8) Inovasi dan Infrastruktur Desa

Implementasi SDG's dalam pengelolaan dana desa Mangki diwujudkan melalui pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/ pengerasan jalan usaha tani, peningkatan prasarana desa (seperti gorong dan selokan), peningkatan fasilitas jamban umum/MCK umum, serta peningkatan saluran irigasi tersier/ sederhana.



Gambar 1 Inovasi dan Infrastruktur Desa

Dalam pembangunan jalan usaha tani, pembangunan gorong/selokan, pembangunan fasilitas jamban umum dan pembangunan saluran irigasi, masyarakat desa Mangki turut dalam proses pembangunan tersebut. Dalam artian bahwa masyarakat desa Mangki ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan infrastruktur desa, baik itu memberikan tenaga, pikiran dan keterampilan.

"Dengan terbangunnya akses jalan tani dan saluran irigasi yang baik, petani di Desa Mangki dapat lebih mudah mengakses sawah dan meningkatkan hasil pertanian. Program ketahanan pangan, seperti bantuan bibit untuk pekebun, juga sangat membantu. Selain itu, akses jalan desa yang sudah baik dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat" (S, 27 Tahun).

Hal ini sejalan dengan pendapat Buana et al., (2018) tentang bentuk-bentuk partisipasi yaitu terdiri atas partisipasi tenaga, partisipasi buah pikiran, partisipasi keterampilan dan partisipasi materi.

9) Lingkungan yang Tenang dan Tentram

Desa Mangki memiliki lingkungan yang tenang dan tenteram. Pemerintah desa Mangki berperan sangat penting dalam mewujudkan lingkungan desa yang tenang dan tentram. Ketentraman dan ketenangan merupakan suatu keadaan agar pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur, ketentraman dan kenyamanan ini dapat terganggu oleh berbagai sebab dan keadaan di antaranya oleh pelanggaran hukum yang berlaku, yang menyebabkan terganggunya ketentraman dan kenyamanan masyarakat desa Mangki. Namun, tindak kriminal dan pelanggaran hukum hampir tidak pernah terjadi di desa Mangki. Artinya pemerintah desa Mangki telah berhasil mewujudkan lingkungan desa mangki yang nyaman dan tenteram.

10) Kemitraan untuk Pembangunan Desa

Implementasi SDG's dalam pengelolaan dana desa Mangki diwujudkan melalui kegiatan pelatihan dan pengelolaan BUM Desa. Pelatihan dan pengelolaan BUMDes di Desa Mangki dilakukan dengan tujuan memberikan pemahaman masyarakat terkait dengan pengelolaan serta cara untuk memanfaatkan peluang usaha serta mengembangkan usaha yang potensial. Hal ini sejalan dengan pernyataan Nursyamsu & Kurniadi (2020) bahwa kegiatan pelatihan berupaya memberikan pemahaman dan pengetahuan, dan gambaran

mengenai pengelolaan BUMDes dan bagaimana mengupayakan agar potensi desa bisa digali untuk menciptakan peluang usaha bagi masyarakat.

11) Kelembagaan dan Budaya

Implementasi SDG's dalam pengelolaan dana desa Mangki diwujudkan melalui pembinaan LKMD/LPM/LPMD dan pembinaan PKK. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa selanjutnya disingkat LKMD atau sebutan lain adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Pembinaan LKMD di Desa Mangki bertujuan untuk membangun kerja sama antar lembaga dalam masyarakat untuk pembangunan desa dan membantu pemerintah desa untuk menciptakan ketahanan yang baik. Hal ini sejalan dengan pernyataan Lismayuni (2016) bahwa fungsi dari LKMD yaitu :

1. Sebagai wadah partisipasi dalam perencanaan dalam pelaksanaan pembangunan.
2. Menanamkan pengertian dan kesadaran penghayatan serta pengamalan Pancasila.
3. Menggali, memanfaatkan semua potensi, serta menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat untuk pembangunan.
4. Sebagai sarana komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat serta antar warga masyarakat itu sendiri.
5. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat.
6. Membina dan menggerakkan potensi pemuda untuk pembangunan.
7. Meningkatkan peran wanita dalam mewujudkan keluarga sejahtera.
8. Membina kerja sama antar lembaga yang ada dalam masyarakat untuk pembangunan.
9. Melaksanakan tugas-tugas lain dalam membantu pemerintah desa untuk menciptakan ketahanan yang mantap.

Adapun gerakan PKK ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dimulai dari unit terkecil, yakni keluarga. Hal ini sejalan dengan pendapat (Alvianta et al., 2021) bahwa tujuan dari PKK yaitu sebagai agen pemberdayaan yang merupakan wadah untuk memberdayakan keluarga pra sejahtera yang ada di lingkungannya.

3. Pengendalian

Pengendalian dilakukan oleh pemerintah Desa yaitu dengan melakukan pendataan dan sosialisasi. Pendataan yang dimaksud yaitu melakukan pendataan ulang yang dilakukan setiap satu tahun, dimana pendataan bertujuan untuk mendata kondisi desa dan penduduk yang terus mengalami perubahan, sehingga perlu adanya pencatatan secara berkala.

"Pendataan ulang dilakukan setiap tahun. mengenai keadaan desa dan keadaan penduduk. Misalnya penduduk pindah, lahir, meninggal, pendapatan, atau terkait kekurangan masyarakat seperti kekurangan makanan dan lain-lain. Sosialisasi ke masyarakat misalnya untuk masyarakat yang kurang memahami terkait SDG's, atau yang belum pernah dijelaskan tujuan SDG's, arahnya kemana. Itu akan dilakukan sosialisasi" (MAA, 26 Tahun).

Dalam hal ini pendataan sama dengan melakukan administrasi kependudukan. Administrasi kependudukan dilakukan untuk mendata kemudian menyusun informasi yang berkaitan dengan jumlah, pertumbuhan penduduk, lingkungan desa, agama, sosial, dan budaya yang ada di desa. Hal ini sesuai dengan definisi administrasi kependudukan menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dalam Nasyafiya (2022), "Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen berkaitan dengan jumlah, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, kualitas, kondisi, kesejahteraan, yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, serta lingkungan". Adapun sosialisasi dalam penelitian ini dilakukan kepada masyarakat yang belum memahami terkait dengan SDG's, akan dijelaskan kembali terkait dengan program-program SDG's desa. Dalam sosialisasi, seseorang akan mengenal dan melakukan

penyesuaian dengan keadaan tempat dia bersosialisasi (Anwar, 2018). Maka dalam penelitian ini, sosialisasi dilakukan untuk menyelaraskan pemahaman terkait SDG's di Desa Mangki agar mereka dapat menyesuaikan diri mereka.

4. Pengevaluasian

Pengevaluasian dilakukan yaitu untuk menilai apakah program yang diusulkan dan dilaksanakan sudah tercapai dan terbentuk. Dalam penelitian ini, terdapat 11 program SDG's yang diimplementasikan terhadap pengelolaan dana Desa Mangki. Masyarakat menyatakan bahwa pengelolaan dana desa sudah dilakukan dengan baik dan telah sesuai dengan peraturan yang ada.

"Pengelolaan dana desa di Desa Mangki sesuai dengan tujuan dan prinsip SDG's yang mencakup berbagai program pemberdayaan, seperti pelatihan keterampilan untuk masyarakat, serta BLT Dana Desa yang mendukung keluarga miskin. Selain itu, program ketahanan pangan berjalan lancar, dengan perbaikan jalan tani dan saluran irigasi yang memudahkan akses lahan dan meningkatkan hasil pertanian. Semua ini mendukung kesejahteraan masyarakat desa" (HA, 64 Tahun).

Selain itu, pengelolaan dana desa dalam pengimplementasian program SDG's dilakukan secara transparan dan melibatkan masyarakat Desa Mangki. Transparan artinya terbuka dalam mengelola dana desa, sehingga masyarakat bisa secara bebas memperoleh informasi terkait dengan pengelolaan dana desa termasuk program pemerintah yang menggunakan dana desa untuk realisasi program tersebut. Hal ini sesuai dengan pengertian transparan menurut Lalolo dalam Soetandy Bonaldy dkk (2018), bahwa transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai.

KENDALA YANG DIHADAPI DALAM IMPLEMENTASI SDG'S TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA

Kendala yang dihadapi dalam implementasi SDG's terhadap pengelolaan dana desa Mangki yaitu dalam proses pendataan dan pemahaman masyarakat terhadap SDG's. Dalam proses pendataan kondisi desa dan penduduk yaitu mendata terkait kondisi lingkungan dari desa dan data penduduk seperti kelahiran, kematian, pekerjaan, penghasilan, dan lain-lain. Proses pendataan masih belum 100% dilakukan sehingga keadaan desa dan penduduk belum sesuai dengan kejadian atau fakta yang sebenarnya.

"Pada pendataan masyarakat desa Mangki belum 100%. SDG's ini dalam bentuk aplikasi di desa, sehingga datanya belum 100% sesuai dengan apa yang ada didesa" (K, 51 Tahun).

Kendala pendataan ini seringkali terjadi pada desa yang ingin melakukan pendataan ulang dalam rangka mengimplementasikan program SDG's. Hal ini pun disebutkan oleh Kurniawan & Artisa (2023) bahwa pada saat pendataan SDGs desa, seringkali menjadi suatu permasalahan yang berkaitan dengan terbatasnya SDM yang dimiliki pemerintah dan keikutsertaan partisipasi masyarakat.

Selanjutnya kendala dalam pemahaman masyarakat Desa Mangki tentang SDG's yaitu masyarakat desa belum memahami maksud dari istilah SDG's namun mengetahui terkait program-program dari SDG's itu sendiri.

"Pemahaman masyarakat tentang SDG's, secara garis besar masyarakat belum memahami terkait SDG's, tentang program-programnya. Tetapi kalo secara tidak langsung, contohnya dalam pengentasan kemiskinan, program-program SDG's masyarakat sudah tau. Tapi kalo istilah SDG's nya masyarakat masih awam. Tapi kalo dijelaskan tentang programnya, pengentasan kemiskinan, pemberdayaan perempuan, kesehatan, mereka tau, kalo ada program pemerintah tentang itu" (F, 36 Tahun).

Maka dalam hal ini, perlu dilakukan sosialisasi terkait dengan SDG's itu sendiri, baik itu pengertian, tujuan, prinsip, dan program-programnya yang harus disesuaikan dengan ketentuan yang ada. Sosialisasi akan memberikan pengetahuan kepada masyarakat desa. Hal

ini sejalan dengan pendapat Sri Mujiarti Ulfah dkk (2024) bahwa dengan adanya sosialisasi diharapkan adanya indikator keberhasilan yang dapat dilihat dari pengetahuan, keterampilan dan implementasi yang ada pada masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan beberapa hal yaitu (1) Pengimplementasian SDG's pada pengelolaan dana desa di Desa Mangki diwujudkan melalui Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional yang terdiri atas empat tahapan yaitu (a) Perencanaan, dilakukan melalui musyawarah dan penyusunan program desa; (b) Pengendalian, dilakukan melalui pendataan dan sosialisasi kepada masyarakat; (c) pelaksanaan, dilakukan melalui program SDG's di Desa Mangki yang terdiri atas 11 program yaitu desa bebas dari kemiskinan, desa bebas dari kelaparan, desa yang sejahtera dan sehat, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi yang baik, menciptakan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi, inovasi dan infrastruktur desa, lingkungan yang tenang dan tentram, kemitraan untuk pembangunan desa serta kelembagaan dan budaya; (d) evaluasi, dilakukan melalui penilaian program yang ada, implementasi program SDGs dalam pengelolaan dana desa di Desa Mangki dinyatakan telah tercapai dengan baik, dimana dilakukan secara transparan dan melibatkan masyarakat desa sendiri; dan (2) Kendala yang dihadapi dalam implementasi SDGs pada pengelolaan dana desa yaitu dalam proses pendataan terkait kondisi lingkungan dan data penduduk yang belum 100% dilakukan serta kendala pada pemahaman masyarakat terhadap konsep SDGs.

Referensi :

- Alvianta, F. N., Prabowo, A. A., & Komarudin, A. (2021). Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (Pkk) Dalam Pemberdayaan Keluarga Prasejahtera. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(3), 137-151. <https://doi.org/10.36312/jisip.v5i3.2095>
- Anwar. (2018). Paradigma Sosialisasi Dan Kontribusinya Terhadap Pengembangan Jiwa Beragama Anak. *Jurnal Al-Maiyyah*, 11(1).
- Arifin Muksin, T. R. & C. V. D. (2023). Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Arumamang Kecamatan Kasiruta Barat Kabupaten Halmahera Selatan. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudHum (Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Hukum)*, 6(2).
- Artisa, M. R. K. & R. A. (2023). Strategi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa Studi Kasus Desa Cibural, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. *Jurnal Kelitbangan*, 11(1).
- Bangun, B. H. (2020). Hak Perempuan dan Kesetaraan Gender dalam Perspektif Filsafat Hukum. *Pandecta Research Law Journal*, 15(1), 74-82. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.23895>
- Buana, S., Triyanti, D. P. B., & Jamaludin, J. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan Usaha Tani Pada Program Gerakan Pembangunan Menuju Masyarakat Sejahtera (Gerbang Emas)“Bersinar” Di Desa Serandang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong. *Japb*, 1(2), 724-738.
- Chikmawati, Z. (2019). Peran Bumdes Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Pedesaan Melalui Penguatan Sumber Daya Manusia. *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1).
- Firdaus, W. P. & R. (2023). *Strategi Pengentasan Kelaparan Di Indonesia Melalui Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan*.
- Hargono, A., Waloejo, C., Pandin, M. P., & Choirunnisa, Z. (2022). Penyuluhan Pengolahan Sanitasi Air Bersih untuk Meningkatkan Kesehatan Masyarakat Desa Mengare, Gresik. *Abimanyu: Journal of Community Engagement*, 3(1), 1-10.

<https://doi.org/10.26740/abi.v3n1.p1-10>

- Hasan, S. (2018). Sistem Perencanaan Pembangunan Dalam Penataan Hukum Nasional (Suatu Kajian Terhadap Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional). *Meraja Journal*, 1(3).
- Hendra, I. A. & A. (2021). Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19 di Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. *JEKP (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik)*, 8(2).
- Kementerian RI Tahun 2012. (n.d.).
- Kriswana, A. (2019). Pelaksanaan Pelatihan Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Mutu Lulusan di MTS ZIA SALSABILA Bandar Setia kecamatan Percut Sei Tuan kabupaten Deli Sedang. *Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*.
- Kurniadi, R. N. dan E. (2020). Pelatihan Peningkatan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Cibuang Kabupaten Kuningan. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2).
- Lismayuni. (2016). *Peran LKMD Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Pergajahan Hulu Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai*. Universitas Medan Area.
- Nasution, Z. (2022). *Implementasi Kebijakan Proses Perencanaan dan Penganggaran Pada Biro Sistem Informasi, Perencanaan dan Pengembangan Universitas Sumatera Utara Medan*. Universitas Medan Area.
- Nasyafiya, R. (2022). *Pelayanan Administrasi Kependudukan Dalam Rangka Pendataan Penduduk Di Desa Meunasah Krueng Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. (n.d.).
- Riyad, M., Ali, A., Septiani, D., Masyani, K., Irfani, A., Zahrotunzibah, A., Dardiri, D., Badriah, S., & Abidin, Z. (2022). Manajemen Peningkatan Mutu untuk Mewujudkan Pendidikan Berkualitas. *Edusifa: Jurnal Pendidikan Islam*, 6(2), 166–173. <https://doi.org/10.56146/edusifa.v6i2.29>
- Soetandy Bonaldy, Florence Daicy Lengkong, V. Y. L. (2018). Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Paslaten Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara. *E-Journal UNSTRAT*.
- Sri Mujiarti Ulfah, Syamsuri, M. F. A. S. (2024). Sosialisasi Sustainable Development Goals (SDGs) Desa di Desa Ujung Pandaran, Kecamatan Teluk Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. *Jurnal Pengabdian Kampus*, 11(1).
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. (n.d.).